



LAPORAN

**EVALUASI KINERJA  
TRIWULAN II**

*TAHUN  
2025*

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis DLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra DLH menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja DLH pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra DLH Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi DLH Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Luwu, 08 April 2025  
Kasubidmas,  


**ANDI MAKKARAKA..M.Si**

Jabatan : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650406 198603 1 017

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. TUGAS DAN FUNGSI .....	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
1.3. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN .....	6
1.4. SISTEMATIKA LAPORAN .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	14
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	14
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	27
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	28
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	67



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur .....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	3
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur .....	17
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tabel Kinerja Tahun 2025 .....	18
Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	28
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi .....	29
Tabel 3. 3 Tabel bobot Indeks Pencemar .....	30
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	30
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026).....	31
Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota.....	32
Tabel 3. 7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	34
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi .....	37
Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	38
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah(2021-2026).....	39
Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota.....	40
Tabel 3. 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	42
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi .....	44
Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	44
Tabel 3. 15 Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota.....	47
Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	49
Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung .....	53
Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya .....	54
Tabel 3. 19 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026).....	54
Tabel 3. 20 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	56

# BABI

## PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Lingkungan Hidup yang semula bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang secara spesifik tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengendalian dan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tahun 2016 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 yang kemudian disusul dengan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 37 tahun 2018 tentang dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 39 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dan pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas** : Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Fungsi :**

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
- Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

**1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

**Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 162 orang, sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tenaga ASN dan tenaga upah jasa. Tenaga ASN berjumlah 25 orang yang terdiri dari laki- laki 14 orang dan perempuan 11 orang, sedangkan tenaga upah jasa berjumlah 138 orang yang terdiri dari laki-laki 77 orang dan perempuan 61 orang. Ditinjau dari

segi kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 1**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN	14	13	27
2	Upah Jasa	77	61	138

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

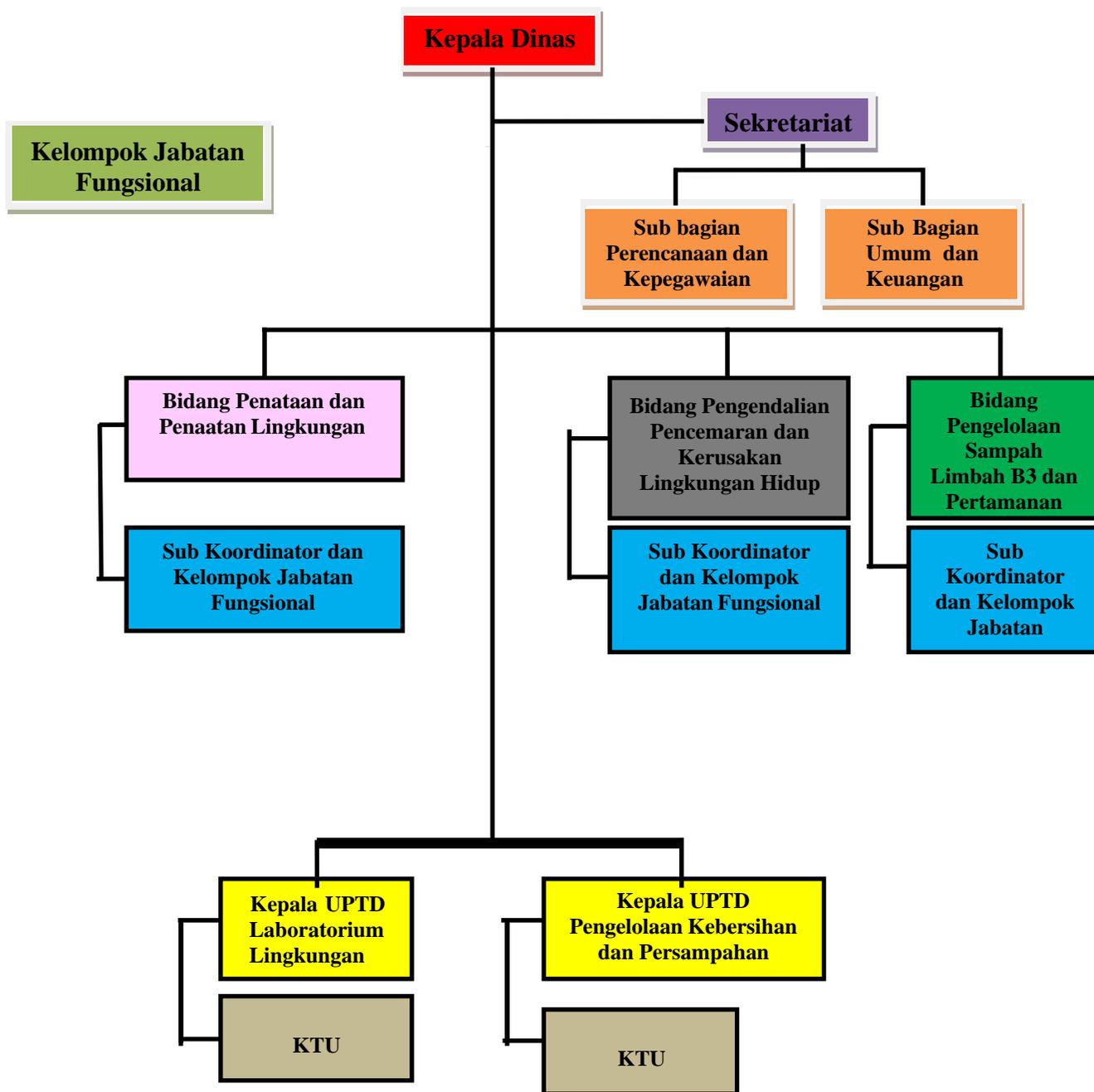
**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan**  
**Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025**

No	GOL	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA / SEDERAJAT		SMP / SEDERAJAT		SD / SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	IV	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
2	III	2	4	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11
3	II	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Upah Jasa	-	-	1	14	1	-	31	13	13	6	31	28	77	61
<b>Jumlah</b>														<b>91</b>	<b>71</b>

Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur sebanyak 25 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 4 orang untuk golongan IV; S1 sebanyak 20 orang untuk golongan III; dan SMA/Sederajatnya sebanyak 1 orang untuk golongan II .

Jumlah tenaga Upah Jasa Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 138 orang yang terdiri dari upah jasa pelayanan umum : 21 orang dan upah jasa tenaga kebersihan 117 orang. Upah jasa tenaga umum dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 14 orang, SMA/Sederajatnya sebanyak 6 orang dan SD sederajat sebanyak 1 orang. Upah jasa tenaga kebersihan sebanyak 117 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 1 orang; D3 sebanyak 1 orang; SMA sebanyak 38 orang; SMP sebanyak 19 orang; SD sebanyak 52 orang dan tidak sekolah sebanyak 6 orang.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



### 1.3. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu- isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Isu-isu strategis lingkungan yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya degradasi lingkungan; Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri.
2. Peningkatan beban pencemaran; Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun.
3. Perubahan iklim; Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap

kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :

#### 1. Pencemaran Air

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah industri tambang disamping itu juga memiliki 3 Danau besar, beberapa sungai besar dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang rawan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur), Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

- Meningkatnya kandungan nutrisi dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air limbah menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.

- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.
- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

## 2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah suatu peristiwa masuk atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pada dasarnya, secara alamiah alam itu mampu mendaur ulang berbagai macam jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, akan tetapi jika konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding dengan laju proses daur ulang maka itulah yang menyebabkan pencemaran. Dalam studi dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akan menimbulkan dampak negatif, terkhusus lagi bagi kehidupan di muka bumi.

Secara umum pencemaran udara di Kabupaten Luwu Timur bersumber dari cerobong asap industri, kabut asap (dampak dari kebakaran hutan), gas buang kendaraan, debu dan masih banyak sumber pencemaran udara lainnya.

### 3. Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam

Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya alam. Degradasi ialah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (antropogenik) ataupun alami.

Kenyataan yang terjadi bahwa manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai dampak yang cenderung menurunkan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam tersebut.

Secara umum penurunan kualitas sumberdaya alam di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, baik itu lahan pertambangan, pertanian, perkebunan, tambak dan perumahan sehingga perlu peran pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan sumberdaya alam.

### 4. Persampahan

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, namun di sisi lain aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup

manusia yang relatif tetap, dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurai sampah, khususnya sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang bersifat anorganik, artinya sangat sulit terurai menjadi satu dengan tanah. Berbeda dengan sampah organik, yang tergolong mudah untuk terdekomposisi menjadi pupuk.

Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan, mulai dari banjir sampai timbulnya masalah-masalah penyakit. Kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih perlu ditingkatkan pentingnya akan kebersihan lingkungan. Kesadaran dan perilaku, merupakan dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Untuk mengubah perilaku manusia, diperlukan strategi dan tahapan-tahapan tertentu.

#### 1.4. SISTEMATIKA LAPORAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

#### LAMPIRAN

BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana strategis juga merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah

perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

## A. VISI DAN MISI

### a. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Lingkungan Hidup mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

### b. MISI

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Adapun Misi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke 3 Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas ”**

## B. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah oleh karena itu Tujuan Strategis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menentukan tujuan strategis yaitu :

***“Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”***

## C. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria yang spesifik, dapat dinilai dan terukur menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan**
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah**

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1

## Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Point	27	27.50	28	28.20	25.00	28.50
		Kualitas Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Udara	Point	29.50	29.55	29.60	29.65	38.00	29.70
			Indeks Tutupan Lahan	Point	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Persen	60.55	60.56	60.57	60.58	70.00	70.00

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 merupakan target kinerja tahun ke tiga dari renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 terdapat rumusan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) kepada atasan langsungnya (dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu

Timur), perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan unit kerja dalam 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 2**  
**PERJANJIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR**  
**TABEL KINERJA TAHUN 2025**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	25.00 Point
		Indeks Kualitas Udara	38.00 Point
		Indeks Tutupan Lahan	17.00 Point
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4,862.233.215.00	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 700.946.600.00	APBD
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 138.700.200.00	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 59.853.950.00	APBD



No	Program	Anggaran	Keterangan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 136.091.000.00	APBD
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp 29,890,900.00	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Rp 26.659.950.00	APBD
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 108,512,950.00	APBD
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 66.126.000.00	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 3,989,109,400.00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 10.118.124.165.00</b>	<b>APBD</b>

Malili, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KAB. LUWU TIMUR

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LUWU TIMUR  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

A. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi salah satu Indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan gambaran capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan gambaran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Nilai IKLH digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	<p>Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)</p>	<p>Air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup karena kualitas air yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia dari sisi kesehatan bahkan menopang keberlangsungan air sebagai salah satu indikator yang patut diperhatikan dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk menggambarkan adanya perbaikan terhadap lingkungan hidup. IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA menunjukkan kondisi kualitas air di suatu wilayah berdasarkan status mutu air hasil</p>	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Dimana</p> <p>Lij: Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)</p> <p>Ci: Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)</p> <p>IPj: Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ:</p> <p>(Ci/Lij, C2/L2j, ...)</p> <p>(Ci/Lij)Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij</p> <p>(Ci/Lij)Rata-rata : Nilai rata-rata dari Cij/Lij</p>	<p>Data uji kualitas air</p>

		dari pengukuran parameter fisika, kimia dan bakteriologis.	
--	--	------------------------------------------------------------	--

2.	<p>Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)</p>	<p>Nilai Indeks kualitas udara digunakan untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.</p> <p>Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan unsur pencemar utama yaitu : Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), Parameter NO<sub>2</sub>.</p> <p>Pengukuran Kualitas Udara ambien di Kabupaten/Kota pada umumnya dilakukan di 4 lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.</p>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kot, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata NO<sub>2</sub> = Rerata hasil pengukuran NO<sub>2</sub> dari 4 lokasi</li> <li>• Rata-rata SO<sub>2</sub> = Rerata hasil pengukuran SO<sub>2</sub> dari 4 lokasi</li> </ul>	<p>Data uji kualitas udara</p>
----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

<p>3.</p>	<p>Indeks Tutupan Lahan (ITL)</p>	<p>Indeks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan Nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari Kondisi Tutupan Lahan dan Tutupan Vegetasi non hutan, dikarenakan di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan nilai IKTL.</p>	<p>ITL = <math>100 - ((84.3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})</math></p> <p>di mana  ITL = Indeks Tutupan Lahan  TL = Tutupan Lahan</p> <p>TL = dihitung dengan rumus : <math>TL = \frac{LTL}{LW}</math></p> <p>Dimana,  LTL = Luas Tutupan Lahan  LW = Luas Wilayah kabupaten/Kota atau Propinsi</p> <p><math>TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0.6) + (Larh \times 0.6)}{LW}</math></p> <p>Keterangan  TL = Tutupan Lahan  Lh = Luas Tutupan Lahan  Lb = Luas belukar di Kawasan Hutan  Lbapl = Luas belukar di APL  Lrth = Luas RTH  Larh = Luar Areal Rehabilitasi Hutan  LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> <p>TL = <math>(Luas\ tutupan\ hutan) + (belukar\ kawasan\ hutan + belukar\ di\ APL + luas\ RTH) \times 0.6) + Luas</math></p>	<p>Data tutupan lahan</p>
-----------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas air	25,00 Point	Penetapan nilai target tahun 2025 diambil dari nilai realisasi tahun 2024. Nilai indeks kualitas Air (IKA) di tahun 2024 adalah 24,44 atau kurang dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2025, sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai IKA pada tahun 2024.
Indeks Kualitas udara	38,00 Point	Penetapan Nilai Target Tahun 2025 diambil dari nilai realisasi Tahun 2024. Berdasarkan hasil indeks kualitas Udara (IKU) di tahun 2024 adalah 37,20, mengalami peningkatan dari nilai target yang ditetapkan pada Tahun 2024 dan juga melebihi dari Nilai target yang akan ditetapkan di Renstra Tahun 2025. Nilai IKU juga sudah sangat baik sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 nilainya dipertahankan.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	17,00 Point	Penetapan nilai target tahun 2025 diambil dari nilai realisasi tahun 2024 Nilai indeks tutupan lahan (ITL) di tahun 2024 adalah 16,31 atau kurang dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2025, sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai ITL pada tahun 2024.

## Penjelasan Kinerja 2

### B. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insptansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan. Nilai SAKIP juga menggambarkan kualitas pencapaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP OPD oleh inspektorat	Lap hasil evaluasi sakiop inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akandicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25	Nilai Akip di tahun 2024 adalah 81,20, dimana mengalami peningkatan dari nilai target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan juga melebihi dari nilai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2024. sehingga dalam penetapan target pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 nilainya mengacu/menyesuaikan dengan capaian nilai Akip tahun 2024.

Kepala Dinas,



Drs. ANDI MAKKARAKA., M.Si  
Pangkat : Pembina Utama  
Muda NIP. 19650406  
198603 1 017

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insptansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan pengukuran evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

<b>N O</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	25.00	0	0
		Indeks Kualitas Udara	38.00	0	0
		Indeks Tutupan Lahan	17.00	0	0
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	70.00	0	0

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

### 1. INDIKATOR INDEKS KUALITAS AIR

#### 1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3. 2  
Target dan Realisasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	25.00	0	0

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I Tahun 2025 belum memiliki nilai indeks kualitas air karena pengambilan sampel air dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun (setiap semester) dimana hasil dari 2 semester di akumulasi untuk dilakukan perhitungan IKA. Hasil IKA akan tersedia pada Triwulan IV.

pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

**Tabel 3. 3**  
**Tabel bobot Indeks Pencemar**

No	Mutu Air	Bobot Nilai Indeks Pencemar	No	Kategori IKA	
1	Memenuhi (Baik)	70	1	Baik	
2	Cemar Ringan	50	2	Sedang	
3	Cemar Sedang	30	3	Kurang	
4	Cemar Berat	10	4	Sangat Kurang	

**1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

**Tabel 3. 4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	28	24,92	89,00 %	28.20	24,44	86,66%	25.00	0	0

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023, 2024, dan 2025, namun nilai IKA tahun 2025 masih Nihil dan Nilai IKA akan terbaca di triwulan IV 2025. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 24,44 sedangkan target IKA pada tahun 2024 sebesar 28.20. Nilai indeks kualitas air (IKA) didapatkan dari hasil pemeriksaan kualitas air pada semester 1 dan semester 2 kemudian dilakukan perhitungan IKA sesuai rumus yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA pada tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021).

### 1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INIDENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 5**  
Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d2025 terhadap target akhir Renstra
Indeks Kualitas Air	24,44	25.00	-	25,00	-

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, hal ini dikarenakan karena nilai IKA tahun 2025 belum tersedia.

#### 1.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

**Tabel 3. 6**  
Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>				
	69,48	0	88.70	0

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, hal ini dikarenakan karena nilai IKLH Nasional dan Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 belum tersedia.

#### 1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

##### ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Nilai IKA Kabupaten Luwu Timur yang berubah secara signifikan. Perhitungan IKA pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70**

(Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021) sedangkan Target nilai IKA yang ada masih mengacu pada target Renstra yang masih menggunakan perhitungan lama.

- Pengujian sampel air sungai dan air danau dilakukan di 2 Laboratorium yakni Laboratorium Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium di UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sehingga terjadi keterlambatan Hasil Uji Laboratorium atas Parameter Air Sungai dan Danau.

#### ❖ Solusi

- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga tidak lagi memeriksakan sampel uji di laboratorium lain dan juga bisa mempercepat hasil pengujian serta tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Air.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKA.

## 1.6 ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

#### ❖ Efisiensi Anggaran

- Pengambilan sampel air semester I untuk data IKLH akan dilaksanakan pada bulan Mei sehingga belum diketahui terkait efisiensi anggaran untuk selisih biaya analisa atau pengambilan sampel.

### ❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam penyampaian informasi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi tersebut. Dan penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram Dinas Lingkungan Hidup.
- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Air.

### ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel 3. 7**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Air	25,00	0	0	146.363.850	0	0

### 1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan indikator indeks kualitas air didukung oleh 10 sub kegiatan diantaranya:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan sementara berjalan untuk pengambil sampel air semester 1. Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan 4 dokumen diantaranya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); dokumen indeks kualitas air (IKA), dokumen indeks kualitas udara (IKU) dan dokumen indeks kualitas tutupan lahan (IKL). Sub kegiatan ini kegiatan ini memuat pemantauan kualitas air untuk 8 (delapan) lokasi pemantauan (6 (enam) sungai yaitu : Sungai Lagego, Sungai Tomoni, Sungai Kalaena, Sungai Angkona, Sungai Malili, dan Sungai Wasuponda sungai dan 2 Danau yaitu Danau Towuti dan Danau Matano). Pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan dalam penentuan hasil IKA diambil dari rata-rata hasil pemantauan kualitas air sebanyak 2 kali.

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah laporan hasil uji laboratorium yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melakukan pemeriksaan sampel air permukaan (air sungai, air danau) dan air limbah. Sub kegiatan ini memuat antara lain, Pengambilan sampel air, Pengujian Sampel air dan Penyampaian Laporan Hasil Uji laboratorium.

3) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

4) **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah penghasil Limbah B3 yang diawasi. **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan kewajiban memiliki izin lingkungan. Pelaksanaan sub kegiatan ini agar pelaku usaha/kegiatan taat dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan terjaga dapat meningkatkan indeks kualitas air (IKA).

- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi**, dimana pada triwulan I telah terealisasi 4 Dokumen lingkungan usaha/ kegiatan . Kegiatan ini memuat antara lain, fasilitasi pemenuhan dokumen lingkungan untuk setiap pelaku usaha serta kunjungan lapangan yang dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan

- 6) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator **jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi**, dimana pada triwulan I perusahaan yang telah diawasi sebanyak 5 usaha/kegiatan. Kegiatan ini memuat antara lain, pengawasan yang dilakukan untuk menilai ketaatan terhadap dokumen lingkungan yang telah dibuat.

- 7) **Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani

- 8) **Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**

Indikator sub kegiatan adalah Sub kegiatan ini di ukur dengan indikator jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani, dimana pada triwulan I terdapat 0 masalah.

- 9) **Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sampah yang ditangani. Semakin bagus pengelolaan sampah maka akan berdampak baik terhadap indeks kualitas air. Sebaliknya penanganan sampah yang tidak bagus dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kualitas air menurun.

#### 10) Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan, Penanganan sampah dapat dilakukan secara maksimal apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

#### 11) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Persampahan

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah bank sampah yang dibina. Faktor-faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai salah satunya adalah banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor informal dan jarak vendor yang terlalu jauh sehingga biaya transportasi melonja

## 2. INDIKATOR INDEKS KUALITAS UDARA

### 2.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3. 8  
Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	38.00	0	0

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 berdasarkan data pemantauan kualitas udara metode passive sampler dengan titik

pemantauan kualitas udara diambil dari 4 (empat) aspek yang mewakili yakni transportasi, pemukiman, industri dan perkantoran dengan parameter yang diukur adalah SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 kali (semester 1 dan semester 2). Hasilnya akan diakumulasikan untuk perhitungan IKU di akhir tahun. Nilai IKU tersedia di triwulan IV.

## 2.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

**Tabel 3. 9**  
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	29,6	38,87	131,32%	29,65	37,20	125,46%	38,00	0	0

## 2.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dan 2023 dan untuk tahun 2025 data tersedia di triwulan IV. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2024 dihitung berdasarkan hasil kualitas udara metode passive sampler di 4 (empat) titik pengamatan yang mewakili wilayah Perkantoran, Industri, Pemukiman dan Transportasi. Nilai IKU pada tahun 2024 adalah 37,20 sedangkan target IKU pada tahun 2024 sebesar 38.87.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 10**  
**Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Target Jangka Menengah(2021-2026)**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d2025 terhadap target akhir Renstra
Indeks Kualitas Udara	29,20	38,00	0	38,00	0

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah, hal ini dikarenakan karena nilai IKU tahun 2025 belum tersedia. \_\_\_\_

#### 2.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020, pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

**Tabel 3. 11**  
**Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan Target dan Capaian Kabupaten/Kota**

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	0	88.70	0

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, hal ini dikarenakan karena nilai IKLH Nasional dan Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 belum tersedia.

## 2.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

### ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Keterlambatan pengiriman data hasil pengukuran kualitas udara ambien

metode *Passive Sampler* dari Direktorat Pengendalian Pencemaran yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU).

#### ❖ Solusi

- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter kualitas udara di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, sehingga ada data pembandingan atas hasil kualitas udara ambient metode passive sampler dari Direktorat Pengendalian Pencemaran.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai IKU.
- Meningkatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll

## 2.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

#### ❖ Efisiensi Anggaran

- Terkait pemenuhan jasa tenaga laboratorium untuk pemeriksaan sampel udara terdapat efisiensi anggaran, karena biaya untuk pemeriksaan sampel udara di Direktorat Pengendalian Pencemaran tidak dipungut biaya (gratis).

#### ❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Kualitas Udara.

## ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3. 12  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

INDIKATOR OR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Udara (IKU)	38,00	0	0	146.363.850	0	0

## 2.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Kualitas Udara didukung oleh 7 sub kegiatan diantaranya:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut  
**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan sementara berjalan untuk pengambil sampel air semester 1. Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan 4 dokumen diantaranya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); dokumen indeks kualitas air (IKA), dokumen indeks kualitas udara (IKU) dan dokumen indeks kualitas tutupan lahan (IKL).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau.  
**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah RTH yang dipelihara. Pelaksanaan sub kegiatan RTH untuk melakukan pemeliharaan taman-taman kota. Ruang terbuka hijau yang bagus dapat meningkatkan indeks kualitas udara.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/

atau izin PPLH.

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan kewajiban memiliki izin lingkungan. Pelaksanaan sub kegiatan ini agar pelaku usaha/kegiatan taat dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan terjaga dapat meningkatkan indeks kualitas udara (IKU).

- 4) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan agar tetap taat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana sudah terlampir dalam dokumen lingkungan.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi. Dinas Lingkungan Hidup masih dalam tahap pendampingan dan pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan dan kewenangan pemberian sanksi untuk sebagian besar sektor usaha/kegiatan menjadi kewenangan Provinsi.

- 6) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Indikator sub kegiatan ini** adalah jumlah penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang berkomitmen dan membuat gerakan peduli terhadap lingkungan.

- 7) Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah sampah yang ditangani. Semakin bagus pengelolaan sampah maka akan berdampak baik terhadap indeks kualitas air. Sebaliknya penanganan sampah yang tidak bagus dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kualitas menurun.

### 3. INDIKATOR INDEKS TUTUPAN LAHAN

#### 3.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3. 13  
Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	17.00	0	0

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024/5 berdasarkan data Tutupan Lahan Kab. Luwu Timur. Komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2025 tersedia di triwulan IV.

#### 3.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3. 14  
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lahan	30,5	16,31	53,48%	30,50	16,29	53,40%	17.00	0	0

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian

tahun 2023, 2024 dengan tahun 2025. Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 0,21 dari nilai IKL 16,52 pada tahun 2022 menjadi 16,31 pada tahun 2023. Penurunan nilai indeks ini disebabkan meningkatnya bukaan lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023

### 3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INIDENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS OPD

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 3.30**

**Perbandingan Capaian kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024	Tahun 2025	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s/d2025 terhadap target akhir Renstra
Indeks Tutupan Lahan	30,50	0	0	30,5	0

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah adalah nihil, karena nilai ITL Tahun 2025 belum tersedia.

### 3.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Interaksi antara pertumbuhan populasi, kepadatan dan migrasi penduduk dengan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Tingginya interaksi tersebut menyebabkan tekanan terhadap ekosistem sehingga mengubah kondisi lingkungan yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekosistem, biota dan masyarakat. Perubahan kondisi lingkungan dicerminkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai tersebut menggambarkan kualitas lingkungan dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Peningkatan nilai pada masing-masing indeks tersebut mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup pada setiap Provinsi di Indonesia.

Peningkatan nilai IKLH dilakukan dengan berbagai intervensi, upaya pengurangan dan pemulihan serta simulasi baik berupa penerapan peraturan dan kebijakan serta pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2020, pencapaian IKLH menjadi salah satu komponen dalam evaluasi kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. IKLH provinsi berkontribusi pada 50% bobot urusan lingkungan hidup, dan IKLH Kabupaten/Kota berkontribusi pada 33% bobot urusan lingkungan hidup.

**Tabel 3. 15**  
**Perbandingan Target dan Capaian Nasional dengan**  
**Target dan Capaian Kabupaten/Kota**

Indikator Sasaran	Nasional		Kabupaten/Kota	
	Target	Capaian	Target	Capaian
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	88,48	0	88.70	0

Berdasarkan tabel di atas, belum terbaca perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, hal ini dikarenakan karena nilai IKLH Nasional dan Nilai IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 belum tersedia.

### **3.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

#### ❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Tutupan Lahan (ITL) terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

- Adanya pembukaan lahan secara besar-besaran untuk keperluan pertambangan, perkebunan dll
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- Kurangnya Data Tutupan lahan.

#### ❖ **Solusi**

- Meningkatkan pengawasan kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan lingkungan yang baik dan benar kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan

mempengaruhi nilai IKL.

- Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
- Memperbaharui data Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur seperti Ruang Terbuka Hijau maupun Tutupan Vegetasi yang lainnya. Diharapkan pembaharuan data tersebut, sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Luwu Timur .

### 3.6. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

#### ❖ Efisiensi Anggaran

- Memaksimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi pelaporan nilai indeks tutupan lahan.

#### ❖ Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DLH Kab. Luwu Timur tetap bekerja dengan maksimal dalam pemenuhan nilai Indeks Tutupan Lahan.

## ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel 3. 16**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Tutupan Lahan	17,00	0	0	146.363.850	0	0

### 3.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Indikator Indeks Tutupan Lahan didukung oleh 11 sub kegiatan diantaranya:

1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KLHS SKPD yang disusun tepat waktu. Target sub kegiatan adalah 1 dokumen KLHS Tata Ruang dan rencana aksi realisasi kinerja di triwulan IV. Tujuan penyusunan dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur adalah dari aspek konservasi sumber daya alam adalah untuk melindungi sumber daya alam yang penting di lingkup kabupaten atau kota, seperti hutan, sungai, dan area pantai, untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem; dan dari aspek perlindungan lingkungan adalah Memastikan bahwa aktivitas pembangunan dan ekonomi di wilayah kabupaten dan kota tidak merusak lingkungan alam, udara, air, serta menjaga kualitas lingkungan hidup

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan. Pelaksanaan sub kegiatan sementara berjalan untuk pengambil sampel air semester 1. Output dari sub kegiatan ini adalah penyusunan 4 dokumen diantaranya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH); dokumen indeks kualitas air (IKA), dokumen indeks kualitas udara (IKU) dan dokumen indeks kualitas tutupan lahan (IKL). Sub kegiatan ini kegiatan ini memuat pemantauan kualitas air untuk 8 (delapan) lokasi pemantauan (6 (enam) sungai yaitu : Sungai Lagego, Sungai Tomoni, Sungai Kalaena, Sungai Angkona, Sungai Malili, dan Sungai Wasuponda sungai dan 2 Danau yaitu Danau Towuti dan Danau Matano). Pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan dalam penentuan hasil IKA diambil dari rata-rata hasil pemantauan kualitas air sebanyak 2 kali

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

**Indikator sub kegiatan** adalah Luas lahan yang direncanakan untuk direhabilitasi.

Pelaksanaan sub kegiatan telah dilaksanakan untuk rehabilitasi lahan seluas 37 Ha di Kawasan IPPKH bertempat di Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Sub kegiatan ini memuat antara lain pemantauan dan evaluasi hasil penanaman pohon pada areal IPPKH Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Desa Pekaloe Kec. Towuti.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah penghasil Limbah B3 yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha penghasil Limbah B3 di Kabupaten luwu Timur yang telah memiliki ijin pengelolaan Limbah B3 untuk penyimpanan Limbah B3.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/

atau izin PPLH.

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan kewajiban memiliki izin lingkungan. Pelaksanaan sub kegiatan ini agar pelaku usaha/kegiatan taat dalam pengelolaan lingkungan. Lingkungan terjaga dapat meningkatkan indeks kualitas air (IKA).

- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan agar tetap taat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana sudah terlampir dalam dokumen lingkungan.

- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diberi sanksi. Dinas Lingkungan Hidup masih dalam tahap pendampingan dan pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan dan kewenangan pemberian sanksi untuk sebagian besar sektor usaha/kegiatan menjadi kewenangan Provinsi.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah masalah lingkungan yang diselesaikan. Penerapan sanksi seperti ini agar bisa meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap nilai indeks kualitas air.

- 6) Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah sampah yang ditangani. Semakin bagus

pengelolaan sampah maka akan berdampak baik terhadap indeks kualitas air.

Sebaliknya penanganan sampah yang tidak bagus dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti kualitas air menurun.

- 7) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang disediakan, Penanganan sampah dapat dilakukan secara maksimal apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

- 8) Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

**Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah bank sampah yang dibina. Faktor-faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai salah satunya adalah banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan untuk 3 indikator diatas di atas maka dapat disimpulkan:

- Data Nilai Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan belum tersedia di Triwulan I, akan tetapi tahapan pelaksanaan pengambilan sampel untuk IKA sudah berjalan.

## **SASARAN STRATEGIS 2 (SASARAN PENDUKUNG)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah**” tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 17  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	70.00	0	0

#### 4. NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

##### 1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

- **Indikator kinerja sasaran penunjang** adalah Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah.

**formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah

*“Jumlah realisasi kinerja dibagi target kinerja dikali seratus”.*

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2025 adalah 70.00% dan realisasi nilai SAKIP Tahun 2024 adalah 81,20%

##### 2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 3. 18**  
**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah</b>								
<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Tahun 2023</b>			<b>Tahun 2024</b>			<b>Tahun 2025</b>		
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Nilai SAKIP	60,57	79,5	131,25%	60,58	81,20	134,04%	70.00	0	0

**3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INIDENGAN TARGET JANGKA MENENGAH**

**Tabel 3. 19**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target JangkaMenengah (2021 - 2026)**

<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah</b>			<b>Target Akhir Renstra 2026</b>	<b>% Capaian s/d 2025 terhadap target</b>
<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2025</b>	<b>akhir Renstra 2026</b>	
<b>Nilai SAKIP</b>	60,58	70,00	0	70	0



#### 4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

---

##### ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses administrasi keuangan yang mempengaruhi realisasi keuangan
- b. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa

##### ❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Percepatan proses administrasi keuangan
- b. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa

#### 5. ANALISIS ATAS EFISIENASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

---

##### ❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DLH, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- a. Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- b. Efisiensi biaya internet kantor yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo

##### ❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan administrasi yang masih kosong pada lingkup

sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.

- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel 3. 20**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	60.58	0	0	4.862.233.215	916.926.804	57.18 %
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	99,90	99,90%	4.862.233.215	916.926.804	57.18 %

## 6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANPENCAPAIAN KINERJA SASARAN

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Trwiulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.504.914.775,- (*Sembilan milyar lima ratus empat juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 10 program, 17 kegiatan, serta 37 sub kegiatan.

Rincian realisasi anggaran Triwulan II Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 21**  
**Rincian Belanja Anggaran T.A 2025 Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kab. Luwu Timur sampai dengan 30 Juni 2025**

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5x100)	8 (5-6)	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)	12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400,000,000	100,000,000	16,153,000	16.15	83,847,000	83.85	383,847,000	95.96	
4.1.02	Retribusi Daerah		400,000,000	100,000,000	16,153,000	16.15	83,847,000	83.85	383,847,000	95.96	
4.0.02.02.20.00.01	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		400,000,000	100,000,000	16,153,000	16.15	83,847,000	83.85	383,847,000	95.96	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		98,006,840	76,406,565	11,474,000	15.02	64,932,565	84.98	86,532,840	88.29	
2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		98,006,840	76,406,565	11,474,000	15.02	64,932,565	84.98	86,532,840	88.29	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		55,384,300	41,906,050	8,750,000	20.88	33,156,050	79.12	46,634,300	84.20	
5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Mahyuddin, ST., MM	1,812,500	1,027,500	-	-	1,027,500	100.00	1,812,500	100.00	
5.1.02.01.01.00.25	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		2,857,000	1,793,750	-	-	1,793,750	100.00	2,857,000	100.00	
5.1.02.01.01.00.26	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak		2,209,800	1,424,800	-	-	1,424,800	100.00	2,209,800	100.00	
5.1.02.01.01.00.29	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer		1,035,000	690,000	-	-	690,000	100.00	1,035,000	100.00	
5.1.02.02.01.00.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33	1,000,000	16.67	7,000,000	58.33	
5.1.02.02.01.00.80	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Honorarium Perencana SKPD)		9,000,000	4,500,000	3,750,000	83.33	750,000	16.67	5,250,000	58.33	
5.1.02.04.01.00.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		26,470,000	26,470,000	-	-	26,470,000	100.00	26,470,000	100.00	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			13,521,400	7,468,900	-	-	7,468,900	100.00	13,521,400	100.00
5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Mahyuddin, ST., MM	71,400	71,400	-	-	71,400	100.00	71,400	100.00	
5.1.02.01.01.00.25	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		636,000	636,000	-	-	636,000	100.00	636,000	100.00	
5.1.02.01.01.00.26	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak		931,000	595,000	-	-	595,000	100.00	931,000	100.00	
5.1.02.01.01.00.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,440,000	800,000	-	-	800,000	100.00	1,440,000	100.00	
5.1.02.04.01.00.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		10,443,000	5,366,500	-	-	5,366,500	100.00	10,443,000	100.00	

# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
					7	(6/5x100)	8	(8/5x100)	10	11	
1	2	3	4	5	6						12
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mahyuddin, ST., MM	1,517,380	920,915	-	-	920,915	100.00	1,517,380	100.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak		1,517,380	920,915	-	-	920,915	100.00	1,517,380	100.00	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mahyuddin, ST., MM	27,583,760	26,110,700	2,724,000	10.43	23,386,700	89.57	24,859,760	90.12	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor		43,000	43,000	-	-	43,000	100.00	43,000	100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		642,500	642,500	-	-	642,500	100.00	642,500	100.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak		1,262,260	779,200	-	-	779,200	100.00	1,262,260	100.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,990,000	1,000,000	-	-	1,000,000	100.00	1,990,000	100.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		23,646,000	23,646,000	2,724,000	11.52	20,922,000	88.48	20,922,000	88.48	
2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			3,954,674,145	2,765,712,252	1,781,878,879	64.43	983,833,373	35.57	2,172,795,266	54.94
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mahyuddin, ST., MM	3,850,540,645	2,697,215,252	1,750,648,879	64.91	946,566,373	35.09	2,099,891,766	54.53	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN		1,470,000,000	1,029,000,000	759,601,600	73.82	269,398,400	26.18	710,398,400	48.33	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		105,000,000	73,500,000	50,723,666	69.01	22,776,334	30.99	54,276,334	51.69	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		160,000,000	112,000,000	82,235,492	73.42	29,764,508	26.58	77,764,508	48.60	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		15,000,000	10,500,000	6,594,075	62.80	3,905,925	37.20	8,405,925	56.04	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		136,000,000	95,200,000	61,005,000	64.08	34,195,000	35.92	74,995,000	55.14	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		95,000,000	66,500,000	52,800,000	79.40	13,700,000	20.60	42,200,000	44.42	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		27,000,000	18,900,000	14,800,000	78.31	4,100,000	21.69	12,200,000	45.19	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		16,000,000	11,200,000	2,929,166	26.15	8,270,834	73.85	13,070,834	81.69	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN		88,500,000	61,950,000	44,465,880	71.78	17,484,120	28.22	44,034,120	49.76	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		8,500,000	5,950,000	4,013,275	67.45	1,936,725	32.55	4,486,725	52.79	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		20,376,000	15,800,000	1,262,772	7.99	14,537,228	92.01	19,113,228	93.80	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		2,000,000	1,700,000	-	-	1,700,000	100.00	2,000,000	100.00	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN		266,090	186,264	10,007	5.37	176,257	94.63	256,083	96.24	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		74,555	52,188	848	1.62	51,340	98.38	73,707	98.86	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN		1,682,324,000	1,177,626,800	659,747,784	56.02	517,879,016	43.98	1,022,576,216	60.78	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK		24,500,000	17,150,000	10,459,314	60.99	6,690,686	39.01	14,040,686	57.31	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mahyuddin, ST., MM	104,133,500	68,497,000	31,230,000	45.59	37,267,000	54.41	72,903,500	70.01	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		567,500	340,000	-	-	340,000	100.00	567,500	100.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak		544,000	340,000	-	-	340,000	100.00	544,000	100.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer		1,035,000	750,000	-	-	750,000	100.00	1,035,000	100.00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		24,000,000	12,000,000	10,000,000	83.33	2,000,000	16.67	14,000,000	58.33	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan		37,680,000	18,840,000	15,700,000	83.33	3,140,000	16.67	21,980,000	58.33	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		8,160,000	4,080,000	3,400,000	83.33	680,000	16.67	4,760,000	58.33	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		32,147,000	32,147,000	2,130,000	6.63	30,017,000	93.37	30,017,000	93.37	

## Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
					6	7 (6/5x100)	8	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.03	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD</b>		18,068,700	11,168,700	5,750,000	51.4832	5,418,700	48.5168	12,318,700	68.18	-
2.11.01.2.03.06	<b>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>		18,068,700	11,168,700	5,750,000	83	5,418,700	217	12,318,700	68.18	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Mahyuddin, ST., MM	3,277,200	3,277,200	-	-	3,277,200	100.00	3,277,200	100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		991,500	991,500	-	-	991,500	100.00	991,500	100.00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan		13,800,000	6,900,000	5,750,000	83.33	1,150,000	16.67	8,050,000	58.33	
2.11.01.2.05	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		89,823,000	76,323,000	30,364,500	39.7842	45,958,500	60.2158	59,458,500	66.20	-
2.11.01.2.05.03	<b>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</b>		16,169,000	10,169,000	5,000,000	83	5,169,000	217	11,169,000	69.08	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Mahyuddin, ST., MM	577,500	577,500	-	-	577,500	100.00	577,500	100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		642,500	642,500	-	-	642,500	100.00	642,500	100.00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33	1,000,000	16.67	7,000,000	58.33	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2,949,000	2,949,000	-	-	2,949,000	100.00	2,949,000	100.00	
2.11.01.2.05.09	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>		36,218,000	28,718,000	-	-	28,718,000	200	36,218,000	100.00	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Mahyuddin, ST., MM	30,000,000	22,500,000	-	-	22,500,000	100.00	30,000,000	100.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6,218,000	6,218,000	-	-	6,218,000	100.00	6,218,000	100.00	
2.11.01.2.05.11	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan</b>		37,436,000	37,436,000	25,364,500	67.75	12,071,500	32.25	12,071,500	32.25	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Mahyuddin, ST., MM	25,000,000	25,000,000	16,575,000	66.30	8,425,000	33.70	8,425,000	33.70	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12,436,000	12,436,000	8,789,500	70.68	3,646,500	29.32	3,646,500	29.32	
2.11.01.2.06	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		202,408,740	167,783,740	81,996,383	48.87	85,787,357	51.13	120,412,357	59.49	-
2.11.01.2.06.01	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>		6,325,000	2,600,000	-	-	2,600,000	100.00	6,325,000	100.00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	Mahyuddin, ST., MM	6,325,000	2,600,000	-	-	2,600,000	100.00	6,325,000	100.00	
2.11.01.2.06.04	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>		4,167,640	4,167,640	2,127,000	51.04	2,040,640	48.96	2,040,640	48.96	-
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan lainnya	Mahyuddin, ST., MM	4,167,640	4,167,640	2,127,000	51.04	2,040,640	48.96	2,040,640	48.96	
2.11.01.2.06.05	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>		5,159,500	5,159,500	800,000	15.51	4,359,500	84.49	4,359,500	84.49	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Mahyuddin, ST., MM	5,159,500	5,159,500	800,000	15.51	4,359,500	84.49	4,359,500	84.49	
2.11.01.2.06.06	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>		4,500,000	2,250,000	1,300,000	57.78	950,000	42.22	3,200,000	71.11	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Mahyuddin, ST., MM	4,500,000	2,250,000	1,300,000	57.78	950,000	42.22	3,200,000	71.11	
2.11.01.2.06.08	<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>		24,900,000	14,250,000	5,175,000	36.32	9,075,000	63.68	19,725,000	79.22	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Mahyuddin, ST., MM	24,900,000	14,250,000	5,175,000	36.32	9,075,000	63.68	19,725,000	79.22	
2.11.01.2.06.09	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>		157,356,600	139,356,600	72,594,383	52.09	66,762,217	47.91	84,762,217	53.87	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Sopir	Mahyuddin, ST., MM	36,000,000	18,000,000	15,000,000	83.33	3,000,000	16.67	21,000,000	58.33	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		121,356,600	121,356,600	57,594,383	47.46	63,762,217	52.54	63,762,217	52.54	

# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I+ TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7 <i>6/5x100</i>	8 <i>(5-6)</i>	9 <i>(8/5x100)</i>	10 <i>(4-6)</i>	11 <i>(10/4x100)</i>	12
2.11.01.2.08	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		157,915,500	82,510,500	56,794,255	68.83	25,716,245	31.17	101,121,245	64.04	-
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,315,500	1,010,500	293,040	29.00	717,460	71.00	1,022,460	77.72	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Mahyuddin, ST., MM	105,000	105,000	99,900	95.14	5,100	4.86	5,100	4.86	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		205,500	205,500	193,140	93.99	12,360	6.01	12,360	6.01	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos		1,005,000	700,000	-	-	700,000	100.00	1,005,000	100.00	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		105,600,000	56,000,000	35,251,215	62.95	20,748,785	37.05	70,348,785	66.62	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Mahyuddin, ST., MM	3,600,000	2,000,000	1,198,250	59.91	801,750	40.09	2,401,750	66.72	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		102,000,000	54,000,000	34,052,965	63.06	19,947,035	36.94	67,947,035	66.61	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		51,000,000	25,500,000	21,250,000	83.33	4,250,000	16.67	29,750,000	58.33	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Mahyuddin, ST., MM	30,000,000	15,000,000	12,500,000	83.33	2,500,000	16.67	17,500,000	58.33	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Tenaga Keamanan		21,000,000	10,500,000	8,750,000	83.33	1,750,000	16.67	12,250,000	58.33	
2.11.01.2.09	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		94,706,000	49,190,000	12,182,044	24.77	37,007,956	75.23	82,523,956	87.14	-
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		62,060,000	36,690,000	11,682,044	31.84	25,007,956	68.16	50,377,956	81.18	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		10,400,000	5,200,000	1,250,000	24.04	3,950,000	75.96	9,150,000	87.98	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Mahyuddin, ST., MM	7,660,000	3,830,000	-	-	3,830,000	100.00	7,660,000	100.00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		9,000,000	6,660,000	622,044	9.34	6,037,956	90.66	8,377,956	93.09	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang		35,000,000	21,000,000	9,810,000	46.71	11,190,000	53.29	25,190,000	71.97	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13,000,000	6,500,000	500,000	7.69	6,000,000	92.31	12,500,000	96.15	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	Mahyuddin, ST., MM	13,000,000	6,500,000	500,000	7.69	6,000,000	92.31	12,500,000	96.15	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19,646,000	6,000,000	-	-	6,000,000	100.00	19,646,000	100.00	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Mahyuddin, ST., MM	19,646,000	6,000,000	-	-	6,000,000	100.00	19,646,000	100.00	
2.11.03	<b>PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA</b>		113,786,000	85,696,675	5,630,000	6.57	80,066,675	93.43	108,156,000	95.05	-
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		113,786,000	85,696,675	5,630,000	6.57	80,066,675	93.43	108,156,000	95.05	-
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		113,786,000	85,696,675	5,630,000	6.57	80,066,675	93.43	108,156,000	95.05	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		400,000	400,000	-	-	400,000	100.00	400,000	100.00	

# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
					6	7 (6/5x100)	8 (5-6)	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	ESTI PURWANIN GSIH, S.Si., MM	561,000	561,000	-	-	561,000	100.00	561,000	100.00	
5.1.02.01.01.026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1,260,000	710,675	-	-	710,675	100.00	1,260,000	100.00	
5.1.02.01.01.029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		345,000	345,000	-	-	345,000	100.00	345,000	100.00	
5.1.02.01.01.036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		2,720,000	1,360,000	-	-	1,360,000	100.00	2,720,000	100.00	
5.1.02.01.01.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3,760,000	2,240,000	-	-	2,240,000	100.00	3,760,000	100.00	
5.1.02.02.01.015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		65,320,000	42,660,000	-	-	42,660,000	100.00	65,320,000	100.00	
5.1.02.02.04.049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		4,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	100.00	4,000,000	100.00	
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		35,420,000	35,420,000	5,630,000	15.89	29,790,000	84.11	29,790,000	84.11	
<b>2.11.03.2.01.15</b>	<b>Pengelolaan Laboratorium LH Kabupaten</b>		<b>408,716,400</b>	<b>242,577,400</b>	<b>76,957,830</b>	<b>31.73</b>	<b>165,619,570</b>	<b>68.27</b>	<b>331,758,570</b>	<b>81.17</b>	<b>-</b>
5.1.02.01.01.002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	KASMAHAT IR, SE	183,610,500	91,805,250	9,343,980	10.18	82,461,270	89.82	174,266,520	94.91	
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK		3,630,400	2,402,900	-	-	2,402,900	100.00	3,630,400	100.00	
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		2,837,500	1,606,250	-	-	1,606,250	100.00	2,837,500	100.00	
5.1.02.01.01.029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		625,000	500,000	-	-	500,000	100.00	625,000	100.00	
5.1.02.01.01.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,400,000	3,000,000	-	-	3,000,000	100.00	5,400,000	100.00	
5.1.02.02.01.015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		90,000,000	48,000,000	37,500,000	78.13	10,500,000	21.88	52,500,000	58.33	
5.1.02.02.01.026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		24,000,000	12,000,000	10,000,000	83.33	2,000,000	16.67	14,000,000	58.33	
5.1.02.02.01.048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi		1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	-	-	-	-	
5.1.02.02.01.050	Belanja Jasa Kalibrasi		15,350,000	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	15,350,000	100.00	
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia		35,000,000	35,000,000	16,133,850	46.10	18,866,150	53.90	18,866,150	53.90	
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,763,000	46,763,000	2,480,000	5.30	44,283,000	94.70	44,283,000	94.70		
<b>2.11.03.2.03</b>	<b>PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>77,127,550</b>	<b>77,127,550</b>	<b>1,480,000</b>	<b>1.92</b>	<b>75,647,550</b>	<b>98.08</b>	<b>75,647,550</b>	<b>98.08</b>	<b>-</b>
<b>2.11.03.2.03.09</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi</b>		<b>77,127,550</b>	<b>77,127,550</b>	<b>1,480,000</b>	<b>1.92</b>	<b>75,647,550</b>	<b>98.08</b>	<b>75,647,550</b>	<b>98.08</b>	<b>-</b>
5.1.02.01.01.008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	ESTI PURWANIN GSIH, S.Si., MM	36,750,000	36,750,000	-	-	36,750,000	100.00	36,750,000	100.00	
5.1.02.01.01.012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		2,148,000	2,148,000	-	-	2,148,000	100.00	2,148,000	100.00	
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan ATK		326,000	326,000	-	-	326,000	100.00	326,000	100.00	
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		274,000	274,000	-	-	274,000	100.00	274,000	100.00	
5.1.02.01.01.026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		270,550	270,550	-	-	270,550	100.00	270,550	100.00	
5.1.02.01.01.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,040,000	1,040,000	-	-	1,040,000	100.00	1,040,000	100.00	
5.1.02.02.01.023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		17,500,000	17,500,000	-	-	17,500,000	100.00	17,500,000	100.00	
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		18,819,000	18,819,000	1,480,000	7.86	17,339,000	92.14	17,339,000	92.14	
<b>2.11.04</b>	<b>PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		<b>127,152,300</b>	<b>106,892,300</b>	<b>25,620,000</b>	<b>23.97</b>	<b>81,272,300</b>	<b>76.03</b>	<b>101,532,300</b>	<b>79.85</b>	<b>-</b>
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>127,152,300</b>	<b>106,892,300</b>	<b>25,620,000</b>	<b>23.97</b>	<b>81,272,300</b>	<b>76.03</b>	<b>101,532,300</b>	<b>79.85</b>	<b>-</b>



# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
					7 (6/5x100)	8 (5-6)	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	AHYAR HAERUDDIN, SE., M.Tr.A.P	127,152,300	106,892,300	25,620,000	23.97	81,272,300	76.03	101,532,300	79.85	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		9,040,000	6,780,000	-	-	6,780,000	100.00	9,040,000	100.00	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		43,750,000	43,750,000	-	-	43,750,000	100.00	43,750,000	100.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		271,300	271,300	-	-	271,300	100.00	271,300	100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		548,000	548,000	-	-	548,000	100.00	548,000	100.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		336,000	336,000	-	-	336,000	100.00	336,000	100.00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		200,000	200,000	-	-	200,000	100.00	200,000	100.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,160,000	2,160,000	-	-	2,160,000	100.00	2,160,000	100.00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		36,000,000	18,000,000	15,000,000	83.33	3,000,000	16.67	21,000,000	58.33	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		10,847,000	10,847,000	10,620,000	97.91	227,000	2.09	227,000	2.09	
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa		10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00		
2.11.05	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		37,092,500	31,092,500	5,731,200	18.43	25,361,300	81.57	31,361,300	84.55	-
2.11.05.2.01	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3		37,092,500	31,092,500	5,731,200	18.43	25,361,300	81.57	31,361,300	84.55	-
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	AHYAR HAERUDDIN, SE., M.Tr.A.P	37,092,500	31,092,500	5,731,200	18.43	25,361,300	81.57	31,361,300	84.55	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		215,000	215,000	-	-	215,000	100.00	215,000	100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		242,000	242,000	-	-	242,000	100.00	242,000	100.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		262,500	262,500	-	-	262,500	100.00	262,500	100.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,160,000	2,160,000	-	-	2,160,000	100.00	2,160,000	100.00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33	1,000,000	16.67	7,000,000	58.33	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		22,213,000	22,213,000	731,200	3.29	21,481,800	96.71	21,481,800	96.71	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			68,885,000	67,583,000	13,305,500	19.69	54,277,500	80.31	55,579,500	80.68
2.11.06.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		68,885,000	67,583,000	13,305,500	19.69	54,277,500	80.31	55,579,500	80.68	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		28,142,000	28,142,000	12,085,500	42.94	16,056,500	57.06	16,056,500	57.06	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		126,000	126,000	-	-	126,000	100.00	126,000	100.00	



# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
					6	7 (6/5x100)	8 (5-6)	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	ABSHAR A RAZAK, SP	375,000	375,000	-	-	375,000	100.00	375,000	100.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		27,641,000	27,641,000	12,085,500	43.72	15,555,500	56.28	15,555,500	56.28	
2.11.06.2.01.09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota & Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	ABSHAR A RAZAK, SP	40,743,000	39,441,000	1,220,000	3.09	38,221,000	96.91	39,523,000	97.01	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		226,000	226,000	-	-	226,000	100.00	226,000	100.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,040,000	1,040,000	-	-	1,040,000	100.00	1,040,000	100.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		39,477,000	38,175,000	1,220,000	3.20	36,955,000	96.80	38,257,000	96.91	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			17,973,700	15,573,700	220,000	1.41	15,353,700	98.59	17,753,700	98.78
2.11.07.2.01	PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		17,973,700	15,573,700	220,000	1.41	15,353,700	98.59	17,753,700	98.78	-
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		17,973,700	15,573,700	220,000	1.41	15,353,700	98.59	17,753,700	98.78	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ESTI PURWANINGSIH, S.Si	156,000	156,000	-	-	156,000	100.00	156,000	100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		698,000	698,000	-	-	698,000	100.00	698,000	100.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		791,700	791,700	-	-	791,700	100.00	791,700	100.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		460,000	460,000	-	-	460,000	100.00	460,000	100.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5,400,000	3,000,000	-	-	3,000,000	100.00	5,400,000	100.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		10,468,000	10,468,000	220,000	2.10	10,248,000	97.90	10,248,000	97.90	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			16,528,000	13,408,000	3,550,000	26.48	9,858,000	73.52	12,978,000	78.52
2.11.08.2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LH UNTUK LEMABAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		16,528,000	13,408,000	3,550,000	26.48	9,858,000	73.52	12,978,000	78.52	-
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		16,528,000	13,408,000	3,550,000	26.48	9,858,000	73.52	12,978,000	78.52	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		108,000	108,000	-	-	108,000	100.00	108,000	100.00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		68,500	68,500	-	-	68,500	100.00	68,500	100.00	



# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA	
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7 (6/5x100)	8 (5-6)	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)	12	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	ESTI PURWANINGSIH, S.Si	282,500	282,500	-	-	282,500	100.00	282,500	100.00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7,280,000	4,160,000	1,400,000	33.65	2,760,000	66.35	5,880,000	80.77		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8,789,000	8,789,000	2,150,000	24.46	6,639,000	75.54	6,639,000	75.54		
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		63,231,500	62,031,500	5,270,000	8.50	56,761,500	91.50	57,961,500	91.67	-	
2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		63,231,500	62,031,500	5,270,000	8.50	56,761,500	91.50	57,961,500	91.67	-	
2.11.09.2.01.001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		63,231,500	62,031,500	5,270,000	8.50	56,761,500	91.50	57,961,500	91.67	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	ESTI PURWANINGSIH, S.Si	172,000	172,000	-	-	172,000	100.00	172,000	100.00		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		342,500	342,500	-	-	342,500	100.00	342,500	100.00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		359,000	359,000	-	-	359,000	100.00	359,000	100.00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7,200,000	6,000,000	1,400,000	23.33	4,600,000	76.67	5,800,000	80.56		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		43,158,000	43,158,000	3,870,000	8.97	39,288,000	91.03	39,288,000	91.03		
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan		12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	100.00	12,000,000	100.00		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			47,587,000	34,087,000	9,604,800	28.18	24,482,200	71.82	37,982,200	79.82	-
2.11.10.2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA			47,587,000	34,087,000	9,604,800	28.18	24,482,200	71.82	37,982,200	79.82	-

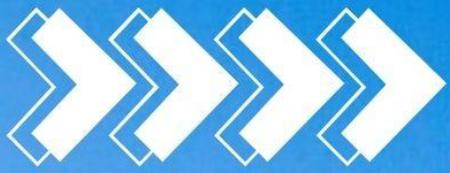
# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5x100)	8 (5-6)	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)	12
2.11.10.2.01.04	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	ABSHAR A RAZAK, SP	36,818,000	24,818,000	7,114,800	28.67	17,703,200	71.33	29,703,200	80.68	-
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		300,000	300,000	-	-	300,000	100.00	300,000	100.00	
5.1.02.02.01.026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		24,000,000	12,000,000	5,000,000	41.67	7,000,000	58.33	19,000,000	79.17	
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12,518,000	12,518,000	2,114,800	16.89	10,403,200	83.11	10,403,200	83.11	
2.11.10.2.01.05	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	ABSHAR A RAZAK, SP	10,769,000	9,269,000	2,490,000	26.86	6,779,000	73.14	8,279,000	76.88	-
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		180,000	180,000	-	-	180,000	100.00	180,000	100.00	
5.1.02.02.01.015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		5,000,000	3,500,000	-	-	3,500,000	100.00	5,000,000	100.00	
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5,589,000	5,589,000	2,490,000	44.55	3,099,000	55.45	3,099,000	55.45	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		3,911,231,900	2,355,486,900	1,343,234,108	57.03	1,012,252,792	42.97	2,567,997,792	65.66	-
2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH		3,911,231,900	2,355,486,900	1,343,234,108	57.03	1,012,252,792	42.97	2,567,997,792	65.66	-
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	AHYAR HAERUDDIN, SE., M.Tr.A.P	80,907,000	74,907,000	18,066,000	24.12	56,841,000	75.88	62,841,000	77.67	-
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		168,500	168,500	-	-	168,500	100.00	168,500	100.00	
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		415,500	415,500	-	-	415,500	100.00	415,500	100.00	
5.1.02.01.01.026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1,145,000	1,145,000	-	-	1,145,000	100.00	1,145,000	100.00	
5.1.02.01.01.029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		805,000	805,000	-	-	805,000	100.00	805,000	100.00	
5.1.02.01.01.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,400,000	2,400,000	-	-	2,400,000	100.00	2,400,000	100.00	
5.1.02.01.01.058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		10,800,000	10,800,000	-	-	10,800,000	100.00	10,800,000	100.00	
5.1.02.02.01.003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia		5,100,000	5,100,000	-	-	5,100,000	100.00	5,100,000	100.00	
5.1.02.02.01.026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12,000,000	6,000,000	5,000,000	83.33	1,000,000	16.67	7,000,000	58.33	
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		48,073,000	48,073,000	13,066,000	27.18	35,007,000	72.82	35,007,000	72.82	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	DARIUS OTTO, SKM	103,730,000	103,730,000	-	-	103,730,000	100.00	103,730,000	100.00	-
5.1.02.01.01.012	Belanja Bahan-bahan Lainnya		103,730,000	103,730,000	-	-	103,730,000	100.00	103,730,000	100.00	
2.11.11.2.01.20	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		3,726,594,900	2,176,849,900	1,325,168,108	60.88	851,681,792	39.12	2,401,426,792	64.44	-
5.1.02.01.01.004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		527,290,000	263,645,000	187,220,400	71.01	76,424,600	28.99	340,069,600	64.49	
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		944,400	944,400	-	-	944,400	100.00	944,400	100.00	
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover		1,464,500	1,464,500	-	-	1,464,500	100.00	1,464,500	100.00	
5.1.02.01.01.029	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1,265,000	1,265,000	-	-	1,265,000	100.00	1,265,000	100.00	



# Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PPK / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	ANGGARAN KAS TW I + TW II	REALISASI ANGGARAN		SELISIH		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
					(RP)	(%)	(RP)	(%)	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5x100)	8 (5-6)	9 (8/5x100)	10 (4-6)	11 (10/4x100)	12
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	DARIUS OTTO, SKM	21,060,000	21,060,000	-	-	21,060,000	100.00	21,060,000	100.00	
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2,551,200,000	1,275,600,000	1,008,400,000	79.05	267,200,000	20.95	1,542,800,000	60.47	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		21,000,000	10,500,000	8,750,000	83.33	1,750,000	16.67	12,250,000	58.33	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		32,700,000	32,700,000	8,232,708	25.18	24,467,292	74.82	24,467,292	74.82	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		56,992,000	56,992,000	7,280,000	12.77	49,712,000	87.23	49,712,000	87.23	
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator		32,000,000	32,000,000	9,150,000	28.59	22,850,000	71.41	22,850,000	71.41	
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader		32,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	100.00	32,000,000	100.00	
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya		10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		262,900,000	262,900,000	94,550,000	35.96	168,350,000	64.04	168,350,000	64.04	
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		66,100,000	66,100,000	975,000	1.48	65,125,000	98.52	65,125,000	98.52	
5.1.02.03.02.0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara		80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	100.00	80,000,000	100.00	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Alat Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2,750,000	2,750,000	-	-	2,750,000	100.00	2,750,000	100.00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23,929,000	23,929,000	610,000	2.55	23,319,000	97.45	23,319,000	97.45		
<b>JUMLAH</b>			<b>9.504.914.775</b>	<b>6.320.651.282</b>	<b>3.471.043.499</b>	<b>54.92</b>	<b>2.849.607.783</b>	<b>45.08</b>	<b>6.033.871.276</b>	<b>63.48</b>	



BAB IV  
PENUTUP



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan kinerja Evaluasi Triwulan I Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup kab Luwu Timur belum menyajikan hasil atas pencapaian kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Nilai IKA, IKU dan ITL tersedia di triwulan IV.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2021 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

➤ Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industri dll.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL.
- Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru.
- Melakukan penambahan ruang lingkup akreditasi untuk parameter yang dibutuhkan dalam pengujian sampel air sungai, air danau bahkan air limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu Timur, sehingga bisa mempercepat hasil pengujian dan tidak menghambat dalam proses penyusunan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan adanya kendala dan strategi pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur kedepannya sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Malili, 08 April 2025

Kepala Dinas,



**AMDI MAKKARAKA..M.Si**

Jabatan : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650406 198603 1 017